



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 02 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAFTAR BIAYA
KOMPONEN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA PENETAPAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi Wajib Pajak, dan stabilitas dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak, perlu dilakukan klasifikasi dan penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu melakukan Reklasifikasi Nilai Jual Objek Pajak dan perubahan Daftar Biaya Komponen Bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak, Daftar Biaya Komponen Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

18. Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah badan yang diberikan kewenangan mengelola Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan yang memiliki kewenangan mengelola Pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11. Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.
14. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
15. Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan atas Pokok Ketetapan PBB-P2 yang diberikan kepada setiap Objek Pajak berdasarkan prosentase terhadap ketetapan PBB-P2 terhutang.
16. Pengurangan DBKB adalah pengurangan atas Pokok Ketetapan DBKB 10% dari DBKB yang diberikan kepada setiap Objek Pajak berdasarkan prosentase terhadap ketetapan DBKB terhutang.

BAB II

KLASIFIKASI, TATA CARA PENETAPAN NJOP DAN DBKB

Pasal 2

- (1) Besaran NJOP Bumi ditetapkan sesuai dengan Klasifikasi NJOP Bumi.
- (2) Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk masing-masing desa dan kelurahan sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Reklasifikasi dilakukan terhadap NJOP sesuai dengan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengurangan dapat diberikan atas Pokok Ketetapan PBB-P2 yang naik akibat reklasifikasi NJOP pada SISMIOP sesuai dengan kriteria tertentu.
- (5) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Besaran NJOP Bangunan ditetapkan sesuai dengan Klasifikasi NJOP Bangunan.
- (2) DBKB sebagai dasar Penetapan NJOP Bangunan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya perubahan DBKB sebagai dasar penetapan NJOP bangunan adalah 10% dari DBKB sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengurangan dapat diberikan atas Pokok Ketetapan kenaikan DBKB 10% dari DBKB pada SISMIOP sesuai dengan kriteria tertentu.
- (5) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pembayaran PBB dapat dibayarkan oleh Wajib Pajak sejak tanggal ditetapkannya NJOP dan sudah memiliki Ketetapan Pajak tahun sebelumnya.

Pasal 5

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Subang adalah sebesar Rp 10.000, - (Sepuluh Ribu Rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 09 Januari 2019

BUPATI SUBANG,

ttd

R U H I M A T

Diundangkan di Subang
pada tanggal 09 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

ttd

ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 02 TAHUN 2019

TANGGAL : 09 JANUARI 2019

TENTANG : KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN

| KELAS | PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m ²) | NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp./m ²) |
|-------|--|--|
| 001 | > 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00 | 68.545.000,00 |
| 002 | > 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00 | 66.255.000,00 |
| 003 | > 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00 | 64.000.000,00 |
| 004 | > 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00 | 61.795.000,00 |
| 005 | > 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00 | 59.625.000,00 |
| 006 | > 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00 | 57.495.000,00 |
| 007 | > 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00 | 55.405.000,00 |
| 008 | > 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00 | 53.355.000,00 |
| 009 | > 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00 | 51.345.000,00 |
| 010 | > 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00 | 49.375.000,00 |
| 011 | > 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00 | 47.445.000,00 |
| 012 | > 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00 | 45.555.000,00 |
| 013 | > 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00 | 43.705.000,00 |
| 014 | > 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00 | 41.895.000,00 |
| 015 | > 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00 | 40.125.000,00 |
| 016 | > 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00 | 38.395.000,00 |
| 017 | > 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00 | 36.705.000,00 |
| 018 | > 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00 | 35.055.000,00 |
| 019 | > 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00 | 33.445.000,00 |
| 020 | > 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00 | 31.875.000,00 |
| 021 | > 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00 | 30.345.000,00 |
| 022 | > 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00 | 28.855.000,00 |

| KELAS | PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m ²) | NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp./m ²) |
|-------|--|--|
| 023 | > 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00 | 27.405.000,00 |
| 024 | > 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00 | 25.995.000,00 |
| 025 | > 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00 | 24.625.000,00 |
| 026 | > 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00 | 23.295.000,00 |
| 027 | > 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00 | 22.005.000,00 |
| 028 | > 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00 | 20.755.000,00 |
| 029 | > 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00 | 19.545.000,00 |
| 030 | > 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00 | 18.375.000,00 |
| 031 | > 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00 | 17.245.000,00 |
| 032 | > 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00 | 16.155.000,00 |
| 033 | > 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00 | 15.105.000,00 |
| 034 | > 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00 | 14.095.000,00 |
| 035 | > 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00 | 13.125.000,00 |
| 036 | > 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00 | 12.195.000,00 |
| 037 | > 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00 | 11.305.000,00 |
| 038 | > 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00 | 10.455.000,00 |
| 039 | > 9.250.000,00s/d 10.040.000,00 | 9.645.000,00 |
| 040 | > 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00 | 8.875.000,00 |
| 041 | > 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00 | 8.145.000,00 |
| 042 | > 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00 | 7.455.000,00 |
| 043 | > 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00 | 6.805.000,00 |
| 044 | > 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00 | 6.195.000,00 |
| 045 | > 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00 | 5.625.000,00 |
| 046 | > 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00 | 5.095.000,00 |
| 047 | > 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00 | 4.605.000,00 |
| 048 | > 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00 | 4.155.000,00 |
| 049 | > 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00 | 3.745.000,00 |
| 050 | > 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00 | 3.375.000,00 |
| 051 | > 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00 | 3.100.000,00 |
| 052 | > 2.850.000,00s/d 3.000.000,00 | 2.925.000,00 |
| 053 | > 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00 | 2.779.000,00 |
| 054 | > 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00 | 2.640.000,00 |
| 055 | > 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00 | 2.508.000,00 |

| KELAS | PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m ²) | NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp./m ²) |
|-------|--|--|
| 056 | > 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00 | 2.352.000,00 |
| 057 | > 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00 | 2.176.000,00 |
| 058 | > 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00 | 2.013.000,00 |
| 059 | > 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00 | 1.862.000,00 |
| 060 | > 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00 | 1.722.000,00 |
| 061 | > 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00 | 1.573.000,00 |
| 062 | > 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00 | 1.416.000,00 |
| 063 | > 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00 | 1.274.000,00 |
| 064 | > 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00 | 1.147.000,00 |
| 065 | > 977.000,00 s/d 1.086.000,00 | 1.032.000,00 |
| 066 | > 855.000,00 s/d 977.000,00 | 916.000,00 |
| 067 | > 748.000,00 s/d 855.000,00 | 802.000,00 |
| 068 | > 655.000,00 s/d 748.000,00 | 702.000,00 |
| 069 | > 573.000,00 s/d 655.000,00 | 614.000,00 |
| 070 | > 501.000,00 s/d 573.000,00 | 537.000,00 |
| 071 | > 426.000,00 s/d 501.000,00 | 464.000,00 |
| 072 | > 362.000,00 s/d 426.000,00 | 394.000,00 |
| 073 | > 308.000,00 s/d 362.000,00 | 335.000,00 |
| 074 | > 262.000,00 s/d 308.000,00 | 285.000,00 |
| 075 | > 223.000,00 s/d 262.000,00 | 243.000,00 |
| 076 | > 178.000,00 s/d 223.000,00 | 200.000,00 |
| 077 | > 142.000,00 s/d 178.000,00 | 160.000,00 |
| 078 | > 114.000,00 s/d 142.000,00 | 128.000,00 |
| 079 | > 91.000,00 s/d 114.000,00 | 103.000,00 |
| 080 | > 73.000,00 s/d 91.000,00 | 82.000,00 |
| 081 | > 55.000,00 s/d 73.000,00 | 64.000,00 |
| 082 | > 41.000,00 s/d 55.000,00 | 48.000,00 |
| 083 | > 31.000,00 s/d 41.000,00 | 36.000,00 |
| 084 | > 23.000,00 s/d 31.000,00 | 27.000,00 |
| 085 | > 17.000,00 s/d 23.000,00 | 20.000,00 |
| 086 | > 12.000,00 s/d 17.000,00 | 14.000,00 |
| 087 | > 8.400,00 s/d 12.000,00 | 10.000,00 |
| 088 | > 5.900,00 s/d 8.400,00 | 7.150,00 |

| KELAS | PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m ²) | NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp./m ²) |
|-------|--|--|
| 089 | > 4.100,00 s/d 5.900,00 | 5.000,00 |
| 090 | > 2.900,00 s/d 4.100,00 | 3.500,00 |
| 091 | > 2.000,00 s/d 2.900,00 | 2.450,00 |
| 092 | > 1.400,00 s/d 2.000,00 | 1.700,00 |
| 093 | > 1.050,00 s/d 1.400,00 | 1.200,00 |
| 094 | > 760,00 s/d 1.050,00 | 910,00 |
| 095 | > 550,00 s/d 760,00 | 660,00 |
| 096 | > 410,00 s/d 550,00 | 480,00 |
| 097 | > 310,00 s/d 410,00 | 350,00 |
| 098 | > 240,00 s/d 310,00 | 270,00 |
| 099 | >170,00 s/d 240,00 | 200,00 |
| 100 | ≤ 170,00 | 140,00 |

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 09 JANUARI 2019
 TENTANG : KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI
 JUAL OBJEK PAJAK, DAFTAR BIAYA
 KOMPONEN BANGUNAN SEBAGAI
 DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN SERTA PENETAPAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

| KELAS | PENGELompokAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp./m ²) | NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN (Rp./m ²) |
|-------|--|--|
| 001 | > 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00 | 15.250.000,00 |
| 002 | > 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00 | 14.150.000,00 |
| 003 | > 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00 | 13.075.000,00 |
| 004 | > 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00 | 12.050.000,00 |
| 005 | > 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00 | 11.075.000,00 |
| 006 | > 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00 | 10.150.000,00 |
| 007 | > 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00 | 9.275.000,00 |
| 008 | > 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00 | 8.450.000,00 |
| 009 | > 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00 | 7.675.000,00 |
| 010 | > 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00 | 6.950.000,00 |
| 011 | > 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00 | 6.225.000,00 |
| 012 | > 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00 | 5.500.000,00 |
| 013 | > 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00 | 4.825.000,00 |
| 014 | > 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00 | 4.200.000,00 |
| 015 | > 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00 | 3.625.000,00 |
| 016 | > 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00 | 3.100.000,00 |
| 017 | > 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00 | 2.625.000,00 |
| 018 | > 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00 | 2.200.000,00 |
| 019 | > 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00 | 1.833.000,00 |
| 020 | > 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00 | 1.516.000,00 |
| 021 | > 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00 | 1.200.000,00 |
| 022 | > 902.000,00 s/d 1.034.000,00 | 968.000,00 |
| 023 | > 744.000,00 s/d 902.000,00 | 823.000,00 |

| KELAS | PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp./m ²) | NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN (Rp./m ²) |
|-------|---|---|
| 024 | > 656.000,00 s/d 744.000,00 | 700.000,00 |
| 025 | > 534.000,00 s/d 656.000,00 | 595.000,00 |
| 026 | > 476.000,00 s/d 534.000,00 | 505.000,00 |
| 027 | > 382.000,00 s/d 476.000,00 | 429.000,00 |
| 028 | > 348.000,00 s/d 382.000,00 | 365.000,00 |
| 029 | > 272.000,00 s/d 348.000,00 | 310.000,00 |
| 030 | > 256.000,00 s/d 272.000,00 | 264.000,00 |
| 031 | > 194.000,00 s/d 256.000,00 | 225.000,00 |
| 032 | > 188.000,00 s/d 194.000,00 | 191.000,00 |
| 033 | > 136.000,00 s/d 188.000,00 | 162.000,00 |
| 034 | > 128.000,00 s/d 136.000,00 | 132.000,00 |
| 035 | > 104.000,00 s/d 128.000,00 | 116.000,00 |
| 036 | > 92.000,00 s/d 104.000,00 | 98.000,00 |
| 037 | > 74.000,00 s/d 92.000,00 | 83.000,00 |
| 038 | > 68.000,00 s/d 74.000,00 | 71.000,00 |
| 039 | > 52.000,00 s/d 68.000,00 | 60.000,00 |
| 040 | ≤ 52.000,00 | 50.000,00 |

BUPATI SUBANG,

ttd

R U H I M A T